

**EVALUASI PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN
KAWASAN WISATA DI DESA KEMANTREN KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Indah Sahiyatul Lailiyah¹, Bambang Kusbandrijo², Indah Murti³

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 15, Pemerintah Desa berkewajiban untuk mengelola potensi desa dalam rangka pencapaian tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi desa, tujuan itu antara lain: peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dari penjabaran tersebut, lantas bagaimana harusnya peran pemerintah desa dalam menjalankan fungsinya utamanya dalam mengelola kawasan wisata desa yang baik agar masyarakat juga ikut merasakan hasil dari pengelolaan wisata tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk Memberikan evaluasi terkait peran pemerintah desa dalam mengelola kawasan wisata religi di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan serta mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berlokus di Desa Kemantren, penelitian ini berfokus pada evaluasi peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan kawasan wisata Di Desa Kemantren Kabupaten Lamongan serta bagaimana faktor pendukung dan penghambatnya. Mempunyai dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder yang merupakan inventarisasi dari teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari data yang terkumpul dianalisa menggunakan analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kemantren telah menjalankan perannya dengan baik dalam pengelolaan kawasan wisata di Desa Kemantren. Penyimpulan tersebut mendasar dari terlaksananya peran pemerintah desa diukur dari ketercapaian tujuan, efektif dan responsif pelaksana kebijakan, dan outcome dari kebijakan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Desa Kemantren tidak mengalami kendala yang berarti.

Peran aktif dari partisipasi masyarakat, komitmen Pemerintah Desa untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lamongan serta lokasi wisata yang strategis menjadi faktor pendukung pengelolaan kawasan wisata Desa Kemantren, dan penataan kawasan wisata, kualitas SDM pengelola dan keterbatasan alokasi anggaran menjadi faktor penghambatnya. Adapun rekomendasi yang peneliti berikan adalah Diperlukan inovasi dari Pemerintah Desa untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan di Desa Kemantren yang akan berdampak pada pemberdayaan masyarakat desa dan konsistensi peran dari pemerintah desa untuk meminimalisir hambatan yang ada dalam pengelolaan kawasan wisata Kemantren. Menjaga konsistensi dari partisipasi masyarakat dengan selalu melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan dan pengembangan kawasan wisata, melakukan pelatihan dan pendampingan terkait kepariwisataan serta menjalin kemitraan yang berorientasi pada pemenuhan sumber daya produktif untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata

Kata kunci : Kebijakan Publik, Evaluasi Kebijakan, Peran, Desa Wisata

1. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sumber pemasukan ekonomi negara yang memiliki potensi sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu Negara. Sektor pariwisata yang ada Indonesia merupakan hal yang sangat mudah untuk dikembangkan dengan melakukan perbaikan infrastuktur, keamanan dan pengelolaan yang baik agar mampu menciptakan sektor pariwisata yang dapat diterima dan diminati wisatawan lokal maupun asing dengan sangat baik. Potensi wisata adalah berbagai sumberdaya yang ada di suatu tempat dan bisa dikembangkan menjadi suatu atraksi wisata yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya. Peningkatan pada sektor wisata juga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, seperti lapangan pekerjaan, pendapatan daerah, dan pendapatan masyarakat. Pembangunan di bidang kepariwisataan juga merupakan salah satu inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan negara.

Dalam Undang-Undang Dalam No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 206, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup yaitu urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Dengan dikembangkannya pembangunan desa wisata akan terjadi arus urbanisasi ke ruralisasi (orang-orang kota senang akan pergi ke desa untuk berekreasi). Desa Kemantren merupakan desa yang sangat strategis letak dan keberadaanya, dikarenakan sangat mudah dijangkau oleh transportasi darat. Desa Kemantren terletak di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan bertempat dipesisir pantai utara laut jawa. Luas Desa Kemantren sebesar 6.613.734 ha,. Akses dari desa ke berbagai tempat perkantoran baik kecamatan atau berbagai tempat pemerintahan lainnya tergolong tidak jauh sehingga masyarakat lenih mudah untuk datang keberbagai lokasi yang diperlukan. Desa Kemantren juga mempunyai beberapa destinasi wisata seperti wisata religi makam Syeikh maulana ishaq dan wisata pantai Joko samudro. Kedua wisata ini sangat berdekatan dan terletak disebelah barat Masjid Al-abror. Dahulu wisata ini belum begitu dikenal oleh masyarakat luas karena letaknya yang berada dipedalaman Desa Kemantren tetapi seiring berjalannya zaman, wisata ini mulai dikenal dari masyarakat luar daerah yang berkunjung untuk berziarah dimakam tersebut sehingga pemerintah desa mulai merenovasi makam tersebut dengan bentuk bangunan yang lebih baik, agar peziarah yang datang nyaman saat melakukan kegiatan keagamaan di makam. Dengan adanya potensi wisata ini, diharapkan Masyarakat dapat memanfaatkan potensi wisata tersebut sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan dapat dengan adanya wisata ini diharapkan agar dapat membantu pemasukan

untuk desa tersebut. Namun terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pengelolaan wisata tersebut seperti kurangnya Peran pemerintah desa dalam mengikutsertakan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan wisata, ditunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata belum mampu dirasakan oleh sebagian masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya musyawarah atau komunikasi yang dilakukan pemerintah desa terhadap masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 15, Pemerintah Desa berkewajiban untuk mengelola potensi desa dalam rangka pencapaian tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi desa, tujuan itu antara lain: peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa sangat penting, karena tugas pokok dari pemerintah desa adalah membina masyarakat desa, membina ekonomi desa, dan mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Bagaimana seharusnya peran pemerintah desa dalam mengelola kawasan wisata desa yang baik agar masyarakat juga ikut merasakan hasil dari pengelolaan wisata tersebut dan pemerintah desa dapat melibatkan masyarakat dalam pengelolaan desa tersebut. Maka penulis akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana evaluasi peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan kawasan wisata Di Desa Kemantren Kabupaten Lamongan serta bagaimana faktor pendukung dan penghambatnya.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, sehingga memiliki syarat. Syarat peran mencakup tiga hal yaitu Pertama, Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan

kemasyarakatan. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Kedua, Peran adalah suatu konsep perilaku yang dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Ketiga, Peranan juga dapat dikatakan sebagai individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto 2012: 174).

Dalam konteks Pemerintahan Desa, peran diartikan sebagai proses pelaksanaan hak dan kewajiban dari Pemerintah desa kepada masyarakat desa. Pelaksanaan hak dan kewajiban dari pemerintah desa bisa tercermin dari sikap pelaksana dan kebijakan yang dibuat. Hal tersebut juga harus dibarengi dengan adanya evaluasi dari bagaimana peran atau kebijakan dari pemerintah desa yang sudah terlaksana. Evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan sudah tercapai. Jika belum, bagaimana yang belum dan apa sebabnya. Menurut Dunn (1999: 608-610) dalam Nugroho (2014: 670-671), menjelaskan bahwa istilah evaluasi sebagai berikut:

- a) Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*).
- b) Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.
- c) Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai dengan melalui tindakan public
- d) Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target
- e) Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk rumusan masalah dan rekomendasi.

Maka keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan khususnya pada implementasi kebijakan publik. Evaluasi pada perumusan dilakukan dengan sisi *post-tindakan*, yaitu lebih pada proses perumusan daripada muatan kebijakan yang biasanya hanya menilai apakah prosesnya sudah sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati. Secara umum, Dunn menggambarkan bahwa dalam proses evaluasi terdapat tiga indikator yaitu ketercapaian tujuan, efektif dan responsive dari pelaksana kebijakan, outcome yang dihasilkan dari implemenetasi kebijakan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berlokus di Desa Kemantren, penelitian ini berfokus pada evaluasi peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan kawasan wisata Di Desa Kemantren Kabupaten Lamongan serta bagaimana faktor pendukung dan penghambatnya. Mempunyai dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder yang merupakan inventarisasi dari teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari data yang terkumpul dianalisa menggunakan analisa kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil pengolahan data maka peneliti dapat menganalisi dengan adanya indikatot-indikator pada teori evaluasi implementasi kebijakan menurut William N Dunn yaitu:

- A. Indikator yang pertama yaitu Ketercapaian Tujuan bahwa dalam hal ini tujuan bisa dikatakan tercapai jika sudah sesuai dengan kebutuhan, nilai-nilai baik yang bisa didapatkan dan kesempatan para pelaksana kebijakan yang dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan yang di rencanakan. Peran pemerintah desa dalam mengelola kawasan wisata diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap masyarakat desa dan setiap program-program yang dijalankan dapat berguna bagi masyarakat dan juga

kelanjutan wisata tersebut. Dalam hal ini Pemerintah desa Kemantren sudah berhasil mengelola dan memanfaatkan kawasan wisata tersebut sesuai yang diharapkan dan juga pemerintah dapat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat desa kemantren dengan dikelola dan dikembangkan wisata ini yang awalnya masyarakat desa kemantren kebanyakan hanya menjadi petani dan nelayan bisa mendapatkan lapangan pekerjaan baru dengan adanya wisata tersebut, selain itu manfaat yang bisa dirasakan dengan adanya wisata ini yaitu desa Kemantren lebih dikenal oleh masyarakat diluar jawa atau skala nasional. Akan tetapi ada beberapa hal yang masih belum maksimal yaitu dalam hal memberdayakan masyarakat pemerintah desa sendiri masih berusaha untuk mencari SDM yang tepat..

- B. Indikator Kedua yaitu Efektifitas dan responsive merupakan hasil yang bisa dicapai dari pengelolaan kawasan wisata di desa Kemantren sebagai tolak ukur dari pelaksana kebijakan yaitu peran pemerintah desa dalam mengelola kawasan wisata untuk mensejahterakan masyarakat di desa tersebut dan juga dapat selalu melibatkan masyarakat dalam pengelolaan wisata, Pemerintah desa Kemantren sudah melakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 15, yaitu Pemerintah Desa berkewajiban untuk mengelola potensi desa dalam rangka pencapaian tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi desa, tujuan itu antara lain: peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pemerintah desa sangat tanggap akan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, manfaatnya pun dapat dirasakan baik dari segi ekonomi , sosial,keagamaan dan lingkungan. Tetapi masih ada kekurangan

yaitu kurangnya peran serta masyarakat dalam mengikuti musyawarah dan kurangnya sosialisasi tentang hasil dan program-program yang akan dijalankan.

- C. Indikator yang ketiga yaitu Outcome yang dihasilkan dari implementasi kebijakan yang dimaksud dengan outcome disini yaitu apabila hasil yang terjadi dalam pelaksanaan program pemerintah dalam mengelola kawasan wisata dapat memberikan dampak, harapan, atau pun manfaat. Seperti melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di desa tersebut . Program-program kebijakan yang di implementasi oleh pemerintah desa kemantren sudah baik, kebijakan tersebut sudah diimplementasikan dan mempunyai dampak baik untuk masyarakat maupun desa, setiap program-program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Meningkatnya kondisi perekonomian desa yang diperoleh dari kegiatan ekowisata dan kunjungan wisatawan yang sepenuhnya dikelola oleh desa dan juga meningkatnya perekonomian masyarakat desa Kemantren yang didapat dari hasil berniaga. Meningkatnya Pembangunan infratraktur desa, beberapa pembangunan secara fisik mulai dilakukan tahun 2009-hingga sekarang semakin pesat dilakukan secara berkelanjutan terutama perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan yang ada di wisata tersebut. Lalu Meningkatnya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lokal terjadi karena kegiatan yang ada dikawasan wisata yang melibatkan penuh peran masyarakat lokal. Peran pemerintah dalam mengelola kawasan wisata ini juga dapat dapat megurangi angka pengangguran di Desa Kemantren.

Selain indikator-indikator tersebut peneliti juga membahas tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

A. Faktor Penghambat

- a) Kurangnya penataan terhadap pengunjung, posisi parkir kendaraan, dan penataan terhadap kios-kios/ kedai
- b) Jalur keluar masuknya Kendaraan wisatawan masih kurang memadai dikarenakan masih melewati jalur pemukiman warga
- c) Kurangnya kesadaran wisatawan yang tidak membuang sampah pada tempatnya
- d) Keterbatasan dana dalam pengelolaan kawasan wisata di desa Kemantren selama ini masih terkendala oleh dana yang dijadikan sebagai sumber utama pembangunan infrastruktur untuk melengkapi kegiatan sarana prasarana yang dapat mendukung kegiatan pengelolaan kawasan wisata secara efektif dan efisien.
- e) Rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) pengelola dalam pemberdayaan menjadi penghambat pengembangan potensi Desa Kemantren.

B. Faktor Pendukung

- a) Tempat wisata yang strategis dan beberapa wisata yang berdekatan bahkan ada dalam satu wilayah contohnya wisata religi yang dieklilingi oleh Laut menjadi suasana sejuk dan segar Dari perpaduan alam,
- b) Kawasan wisata yang terbilang murah merupakan salah satu yang digemari oleh pengunjung
- c) Tingginya Partisipasi masyarakat desa Kemantren rasa antusiasme masyarakat sekitar kawasan wisata untuk ikut berpartisipasi secara langsung dalam membantu menyiapkan wisata baik secara fisik maupun financial

- d) Peran Pemerintah Desa Kemantren Pemerintah Desa Kemantren memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menjadikan Desa Kemantren sebagai tempat wisata alam. Hal ini terlihat dari upaya Pemerintah Desa untuk memenuhi standart kinerja yang aktif dalam membuat program-program sosial maupun program-program yang dapat memajukan kawasan wisata
- e) Dukungan dinas pariwisata lamongan yang mengikutsertakan wisata ini dalam bebrapa lomba-lomba wisata nasional dan menjadikan wisata ini banyak dikenal oleh masyarakat luar.
- f) Acara rutin tiap tahun (HAUL) yang dijadikan salah satu ajang dalam mensukseskan promosi kawasan wisata di desa kemantren

4. KESIMPULAN

Jadi kesimpulan yang dapat diperoleh dari fakta-fakta yang telah dibahas pada hasil penelitian dalam penelitian “Evaluasi Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Di Desa Kemantren” berdasarkan teori menurut william N dunn yaitu, peran pemerintah desa dalam mengelola kawasan wisata di desa Kemantren dinilai baik karena hampir seluruh atau setidaknya sebagian besar program-program atau kegiatan-kegiatan didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa kemantren dan untuk kepentingan pengembangan kawasan wisata untuk kedepannya. Peran pemerintah desa juga sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 15, yaitu Pemerintah Desa berkewajiban untuk mengelola potensi desa dalam rangka pencapaian tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi desa, tujuan itu antara lain: peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah Terdapat beberapa indikator yang digunakan penulis dalam mengalisi yaitu

Ketercapaian tujuan yaitu tujuan-tujuan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola kawasan wisata di desa Kemantren sudah bisa dikatakan berhasil dan pemerintah desa dapat memanfaatkan kawasan wisata tersebut sesuai yang diharapkan dan juga pemerintah dapat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat desa kemantren. Selanjutnya yaitu indikator kedua adalah Efektif dan responsive dari pelaksana kebijakan disini Pemerintah desa Kemantren sudah melakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 15, meskipun belum maksimal tetapi pemerintah desa masih berupaya meningkatkan perannya, dan indikator ketiga yaitu outcome yang dihasilkan dari implementasi kebijakan dalam hal ini pelaksanaan program-program sudah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan dapat memberikan dampak positif untuk masyarakat. Peran aktif dari partisipasi masyarakat, komitmen Pemerintah Desa untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lamongan serta lokasi wisata yang strategis menjadi faktor pendukung pengelolaan kawasan wisata Desa Kemantren, dan penataan kawasan wisata, kualitas SDM pengelola dan keterbatasan alokasi anggaran menjadi faktor penghambatnya.

Berdasarkan Hasil penyimpulan maka peneliti merekomendasikan Diperlukan inovasi dari Pemerintah Desa untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan di Desa Kemantren yang akan berdampak pada pemberdayaan masyarakat desa dan konsistensi peran dari pemerintah desa untuk meminimalisir hambatan yang ada dalam pengelolaan kawasan wisata Kemantren. Menjaga konsistensi dari partisipasi masyarakat dengan selalu melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan dan pengembangan kawasan wisata, melakukan pelatihan dan pendampingan terkait kepariwisataan serta menjalin kemitraan yang berorientasi pada pemenuhan sumber daya produktif untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata

DAFTAR PUSTAKA

- Alinda Dwi Safitri, Resti Ramadani. (2017). *FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK*. Retrieved from Academia: https://www.academia.edu/36705668/FORMULASI_KEBIJAKAN_PUBLIK
- Berdesa. (2018, Desember). *Definisi Desa menurut Berbagai Ahli*. Retrieved from Berdesa: <http://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/>
- Hadinoto. (1996). Retrieved from Definisi Pariwisata (indikator, perkembangan, Objek dan daya tarik): <https://www.hestanto.web.id/definisi-pariwisata-indikator-perkembangan-objek-dan-daya-tarik/>
- Hidayat, A. (2012). *Penjelasan Lengkap Tentang Penelitian Kualitatif*. Retrieved from statistikian.com: <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>
- Ibrahim, A. (n.d.). *Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli*. Retrieved from pengertian definisi.com: <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-kebijakan-publik-menurut-para-ahli/>
- Admin. (2016, Juni 27). *Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli*. Retrieved from Mari Kita Belajar: <http://www.markijar.com/2016/06/12-pengertian-otonomi-daerah-menurut.html>
- Ahmad, U. (2017, Februari 13). *Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Retrieved from Academia: https://www.academia.edu/32575250/Teori_Desentralisasi_dan_Otonomi_Daerah.docx
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>, 2.
- Alinda Dwi Safitri, Resti Ramadani. (2017). *FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK*. Retrieved from Academia: https://www.academia.edu/36705668/FORMULASI_KEBIJAKAN_PUBLIK
- Berdesa. (2018, Desember). *Definisi Desa menurut Berbagai Ahli*. Retrieved from Berdesa: <http://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/>
- Ensiklopedia, W. (n.d.). *Desa*. Retrieved from Wikipedia: <https://id.wikipedia.org/wiki/Desa>
- Ilman, M. (2014, April 14). *Konsep Evaluasi kebijakan*. Retrieved from Media Ilman: <http://media-ilman.blogspot.com/2014/04/konsep-evaluasi-kebijakan.html>
- Siddiq, R. (2019). *pengertian Desa Menurut Para Ahli*. Retrieved from RumusRumus: <https://rumusrumus.com/pengertian-desa/>

